ANALISIS PENGARUH MONEY POLITIK DI PILKADA BANDA ACEH TAHUN 2024

Abdullah Sani^{1*}, Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyi²

¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia,

²Universitas Jabal Ghafur, Aceh, Indonesia

*Corresponding author: a.sani.usman@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Pilkada atau disebut juga pemilihan kepala daerah adalah suksesi kepemimpinan kepala daerah setiap lima tahun sekali. Pilkada pertama kali dilaksanakan adalah tahun 2007. Calon pilkada yang diusung adalah dengan dua cara, yaitu melalui dukungan partai politik atau dengan jalur independen. Biaya yang dibutuhkan untuk sebuah suksesi pilkada tidak sedikit, mencapai angka di atas seratus miliar lebih untuk paslon gubernur dan wakil gubernur. Demikian juga untuk kepala daerah di kabupaten/kota, angkanya juga fantastis. Kebutuhan anggaran yang begitu besar selain untuk cost politik juga sebagai stimulan meraup suara mayoritas. Hampir tidak ditemukan paslon kepala daerah yang berkontestasi di pilkada nihil anggaran, apabila untuk menjadi pemenang. Pada pilkada Banda Aceh yang diselenggarakan pada 27 November 2024, memunculkan masalah tersendiri karena dari empat paslon yang berkompetisi, hanya satu paslon yang diyakini tidak menggunakan cara-cara ilegal alias money politik. Ketiga paslon lainnya dicurigai banyak pihak menggunakan money politik demi meraup suara mayoritas. Suara yang diraih oleh ketiga paslon di Kota Banda Aceh sangat terpengaruh dengan uang atau bantuan dalam bentuk lain sehingga menambah suara pemilih bagi paslon-paslon tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian kualitatif di mana data diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh money politik di pilkada Banda Aceh pada tahun 2024 tidak signifikan. Paslon yang menggelontorkan anggaran banyak tidak mampu mempengaruhi masyarakat dengan anggaran besar yang disiapkan. Masyarakat mengambil uang yang diberikan oleh paslon, tetapi tidak semuanya mencoblos paslon yang melakukan praktek money politik. Adapun bentuk operasional money politik di pilkada Banda Aceh pada tahun 2024 lalu adalah dengan memberikan sejumlah uang secara langsung maupun melalui transfer ke rekening pemilih pada hari dan malam minggu tenang. Adapun saran dari penelitian ini adalah agar Pengawas Pilkada (Panwaslih) direkrut bukan dari dukungan partai politik dan pelaku money politik dapat didiskualifikasi kendati tidak dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis

Kata Kunci: Analisis, Politik Uang, Pilkada, Banda Aceh

Abstract

Regional head elections (Pilkada) is the succession of regional government held every five years. The first pilkada was held in 2007. The candidates for that election was nominated in two ways: first, through the political parties and second, through an independent channel. The cost of Pilkada is relatively high, reaching more than one hundred billion for gubernatorial and deputy gubernatorial candidates. Likewise for regional heads in districts/cities, the cost is fantastic. The need for such a high budget is not only for political costs but also as a stimulant to gain the majority of voters. There are almost no candidates who contest with a zero-budget. In the Banda Aceh regional elections held on November 27, 2024, a problem arose because of the four competing candidate pairs, only one candidate pair was believed not to have use money politics. The other three candidate pairs were suspected by many parties of using money politics in order to gain the majority of votes. The votes won by the three candidate pairs in Banda Aceh City were greatly influenced by money or other forms of assistance, thus increasing the number of voters for the candidates. This type of research is empirical research or qualitative research in which data is obtained from interviews with respondents. The results of the study show that the influence of money politics in the 2024 Banda Aceh Pilkada is not significant. Candidate pairs who spend a lot of money are unable to influence the voters. Although the voters accepted the money given by the candidate pairs, they do not vote for the candidate pairs who practice money politics. The operational form of money politics in the 2024 Banda Aceh pilkada was by giving money directly or by transfer to voters' accounts on quiet days and nights. This study suggest from that the Election Supervisors (Panwaslih) be recruited not from the support

of political parties and that perpetrators of money politics can be disqualified even though it is not carried out in a structured, massive, and systematic manner.

Keywords: *Analysis, Money Politik, Pilkada , Banda Aceh*

1. PENDAHULUAN

Fenomena politik uang atau *money politic* dalam setiap pesta demokrasi sulit dibendung. Pada dasarnya tujuan utama pelarangan politik uang demi menjaga keadilan demokrasi, yakni agar setiap orang atau calon yang berkontestasi selain tujuan efisiensi juga mencegah terjadinya perilaku koruptif jika mereka terpilih kelak. Tujuan lagi agar menjaga kualitas pesta demokrasi sehingga tidak terjadi tindakan mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok daripada kepentingan umum. Tujuan lain menghindari apatisme dan skeptisme terhadap proses pemilu atau pilkada.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik politik uang masih marak terjadi karena berbagai faktor, seperti rendahnya literasi politik masyarakat dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku (Sanawiyah, 2020). Bagi sebagian masyarakat, menerima uang atau barang dari kandidat dianggap sebagai hal yang wajar, bahkan menjadi bagian dari "tradisi" dalam pemilu. Praktik ini tidak hanya menciptakan budaya politik yang transaksional tetapi juga memperkuat pola pikir yang pragmatis di kalangan pemilih (Rosyad, 2021). Akibatnya, suara pemilih tidak lagi mencerminkan aspirasi politik yang murni, melainkan dipengaruhi oleh iming-iming materi. Di sisi lain, kandidat yang terlibat dalam politik uang sering kali memandang praktik ini sebagai jalan pintas untuk meraih dukungan, meski pada akhirnya justru berpotensi menciptakan pemerintahan yang tidak transparan dan berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Widiyanti, 2024). Jika praktik ini terus berlangsung, dampaknya tidak hanya merusak kualitas demokrasi, tetapi juga memperkuat siklus korupsi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik politik uang masih marak terjadi karena berbagai faktor, seperti rendahnya literasi politik masyarakat dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku. Bagi sebagian masyarakat, menerima uang atau barang dari kandidat dianggap sebagai hal yang wajar, bahkan menjadi bagian dari "tradisi" dalam pemilu. Akibatnya, suara pemilih tidak lagi mencerminkan aspirasi politik yang murni, melainkan dipengaruhi oleh iming-iming materi. Di sisi lain, kandidat yang terlibat dalam politik uang sering kali memandang praktik ini sebagai jalan pintas untuk meraih dukungan, meski pada akhirnya justru berpotensi menciptakan pemerintahan yang tidak transparan dan berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Jika praktik ini terus berlangsung, dampaknya tidak hanya merusak kualitas demokrasi, tetapi juga memperkuat siklus korupsi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik.

Dalam tataran praksis kadang sulit dibedakan antara *money politic* dan *cost politic* karena keduanya sama-sama memberikan sesuatu barang atau materi yang berharga. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada/Pemilihan sebagaimana diatur di Pasal 187A menjelaskan, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam bulan) atau paling lama 72 (tujuh puluh dua rupiah) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". Pada ayat (2) ditegaskan, "Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana

dimaksud apada ayat (1).”

Beberapa hal penting yang perlu di-*breakdown* di Pasal 187A di atas meliputi: (a) pelaku politik uang adalah ”setiap orang”; (b) dengan sengaja; (c) melawan hukum; (d) menjanjikan; (e) memberikan uang; (f) materi lainnya; (g) sebagai imbalan; (h) secara langsung maupun tidak langsung; (i) untuk mempengaruhi Pemilih. Pemberian uang atau materi lainnya ini bertujuan: (a) tidak menggunakan hak pilihnya; (b) menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara tidak sah; (c) memilih calon tertentu; (d) tidak memilih calon tertentu. Jika dilihat secara empirik, poin c dan d yang sering terjadi dalam praktek politik uang di setiap even demokrasi.

Pengertian ”setiap orang” adalah siapa saja yang termasuk subjek hukum. Subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban. Dalam pilkada atau pemilu, subjek hukum orang (*person*) adalah mereka yang telah memiliki hak pilih, yakni telah berumur 17 tahun atau sudah/pernah menikah. Pengertian ” dengan sengaja” atau *dolus* dapat dimaknai dengan tiga hal; (1) kesengajaan bersifat tujuan (menghendaki untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman; (2) kesengajaan secara keinsafan kepastian, yakni pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu; (3) kesengajaan keinsafan kemungkinan, yaitu terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Selanjutnya unsur kesengajaan lain adalah culpa, yakni kesalahan sebagai akibat dari kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi.

Kemudian pengertian ”melawan hukum” atau PMH dalam hukum pidana dapat dimaknai ada larangan atau ancaman yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini ancaman atau larangan diatur di Pasal 187A UU Nomor 10 Tahun 2016. Unsur pidana lain dalam UU Pilkada adalah ”menjanjikan”, yakni menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Unsur lain adalah ”memberikan uang”, yakni memberikan sejumlah uang dalam jumlah tertentu kepada Pemilih. Lalu maksud dari ”materi lainnya” adalah semua barang yang berharga, seperti sajadah, sembako, mukena, dan lain-lain.

Selanjutnya ”sebagai imbalan” bermakna upah sebagai pembalas jasa. Kemudian pengertian ”secara langsung maupun tidak langsung” adalah paslon atau tim sukses maupun relawan yang menyerahkan langsung sejumlah uang atau materi lainnya (M.Yusuf Al-Qardhawy, mantan Ketua Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Banda Aceh periode 2018-2023 pada 2 Januari 2025).

Money politik pada pilkada Banda Aceh terutama menjelang pemilihan 27 November 2024 cukup terasa. Pada malam pemilihan, Pengawas Pilkada Kota Banda Aceh menangkap lima orang yang diduga dari salah satu tim paslon sedang memberikan uang kepada pemilih di salah satu cafe di Kota Banda Aceh. (Teuku Muhammad Valdy Arief, ”5 Orang Terjadi OTT Politik Uang di Banda Aceh”, diakses melalui: <https://regional.kompas.com> pada 3 Januari 2025).

Menurut salah satu pengurus Koalisi Sipil Pemantau Pilkada (KSPP) Aceh, Destika Gilang mengungkapkan, politik uang yang terjadi di Pilkada Banda Aceh tahun 2024 menggunakan skema baru, penggunaan transfer melalui rekening bank maupun e-money gencar dilakukan selain memberikan secara langsung dan juga dalam bentuk barang.

Fenomena politik uang dalam Pilkada Banda Aceh 2024 menunjukkan adanya pergeseran metode yang digunakan oleh para pelaku. Jika sebelumnya praktik politik uang lebih banyak dilakukan secara konvensional, seperti pemberian uang tunai secara langsung atau dalam bentuk barang, kini terjadi adaptasi dengan memanfaatkan teknologi keuangan. Skema baru yang digunakan, seperti transfer melalui rekening bank maupun e-money, mencerminkan adanya upaya untuk menyamarkan transaksi dan mengurangi risiko tertangkap oleh pihak berwenang.

Penggunaan metode digital dalam politik uang ini menunjukkan bahwa para pelaku semakin memahami perkembangan teknologi dan regulasi yang ada. Transfer melalui rekening bank atau e-money dapat memberikan keuntungan dari segi kemudahan transaksi dan anonimitas, meskipun tetap meninggalkan jejak digital yang dapat ditelusuri oleh lembaga pengawas pemilu dan aparat penegak hukum.

Di sisi lain, fenomena ini menjadi tantangan baru bagi pihak berwenang, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk meningkatkan kapasitas dalam mengidentifikasi dan mencegah praktik politik uang berbasis digital. Kolaborasi dengan lembaga keuangan serta penggunaan teknologi forensik keuangan menjadi langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mendeteksi aliran dana yang mencurigakan selama proses pemilu.

Selain itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya politik uang, baik dalam bentuk konvensional maupun digital. Kampanye pendidikan politik yang berfokus pada integritas pemilu dan konsekuensi hukum bagi penerima maupun pemberi politik uang perlu diperkuat guna menciptakan proses demokrasi yang lebih bersih dan adil.

”Serangan fajar yang di jam subuh pada saat mau pemilihan itu tren zaman, trennya sekarang pakai uang elektronik. Jadi si pemilih yang namanya sudah tercatat tinggal datang ke konter dan ambil uangnya di sana, begitu juga dengan sembako.” (Fitri Juliana, “Ada Politik Uang di Pilkada Kota Banda Aceh”, diakses melalui: <https://digdata.id> pada 2 Januari 2025).

Pada pilkada Banda Aceh 2024 lalu, banyak pihak menilai terjadi politik uang yang cukup masif. Praktik ilegal ini dilakukan menjelang hari pencoblosan atau pada masa minggu tenang hingga malam hari. (Fitri Juliana, “Ada Politik Uang di Pilkada Kota Banda Aceh”, diakses melalui: <https://digdata.id> pada 2 Januari 2025). Berdasarkan uraian di atas menarik dilakukan penelitian untuk menjawab persoalan tersebut dengan rumusan apakah money politik pada pilkada Banda Aceh tahun 2024 lalu mempengaruhi kontituen memberikan suaranya dan bagaimana bentuk operasional money politik di pilkada Banda Aceh tahun 2024.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau penelitian kualitatif (*qualitative research*). Peneliti melakukan wawancara langsung dengan para responden yang mengetahui fenomena money politik pada pilkada tahun 2024 di Kota Banda Aceh. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian akan diolah untuk dianalisis secara kualitatif. Konsep metode kualitatif yaitu dengan menjelaskan segala sesuatu mengenai topik yang dibahas dengan menghasilkan data-data analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah memuatkan perhatian pada permasalahan yang diteliti kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh dan bentuk operasional money politik pada pilkada Banda Aceh tahun 2024.

Pilkada Kota Banda Aceh tahun 2024 diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia. Pilkada tahun 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024. Pilkada tahun 2024 ini merupakan kontestasi serentak dilaksanakan di 38 provinsi dan 416 kabupaten dan 98 kota. (Arum Sutrisna Putri, Daftar Kabupaten dan Kota di Indonesia, diakses melalui: <https://www.kompas.com> pada 4 Januari 2025). Sejak pilkada langsung dilaksanakan tahun 2007, tindakan money politik yang dilakukan oleh kontestan sulit dibendung. Hal ini bukan hanya merusak tatanan demokrasi, tetapi melahirkan kepala daerah yang tidak berkualitas.

Pada pilkada Banda Aceh diikuti oleh empat paslon, yakni:

1. Illiza Sa'duddin Djamal – Afdhal Khalilullah.

2. Zainal Abidin – Mulia Rahman.
3. Aminullah Usman – Isnaini.
4. Irwan Djohan – Khairul Amal.

Keempat paslon di atas hanya satu paslon yang tidak ditemukan melakukan praktek money politik. Hal ini karena paslon nomor urut 2 (Zainal Abidin – Mulia Rahman) tidak memiliki kost politik yang relatif.

”Dari awal memang paslon yang kami usung dan dukung tidak ada modal, tapi karena mereka orang baik, saya mendukungnya. (Wawancara dengan pendukung paslon 02 (inisial R) pada tanggal 9 Januari 2025). Hal senada ditegaskan oleh mantan tim pendukung (tim sukses) 02 (Zainal Abidin – Mulia Rahman) bahwa ia tidak lagi mendukung paslon tersebut setelah melihat tidak memiliki modal untuk mendanai proses pilkada.

”Awalnya saya dan ratusan anggota saya pendukung paslon 02 dari jalur independen, tetapi karena tidak ada modal, maka kami beralih ke paslon lain. Mana mungkin paslon yang tidak memiliki modal atau kost politik bisa menang, buang-buang waktu saja.” (Wawancara dengan (inisial AM) pada 9 Januari 2025).

Penjelasan di atas menunjukkan kost politik penting dalam sebuah pesta demokrasi untuk membiaya keperluan dan kebutuhan tim selama masa tahapan. Kost politik merupakan modal utama dalam ”menghidupkan” tim berjalannya tim sukses.

”Tidak ada modal politik untuk membiayai tim sukses berat rasanya untuk menang. Pengalaman saya sebagai penyelenggara pemilu, paling tidak butuh modal sekitar 20-30 miliar untuk membiayai sebuah kontestasi politik sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten/kota.” (Wawancara dengan mantan komisioner Panwaslih Pilkada pada 10 Januari 2025).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kost politik tidak bisa dihindari bagi semua kontestan dalam pilkada. Angka atau jumlahnya bervariasi tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk di wilayah itu. Kost politik untuk membiayai jalannya tim sukses atau kebutuhan untuk operasional dan mencetak alat peraga kampanye (APK) tidak dilarang termasuk biaya transportasi ketika ada kampanye.

”Tidak ada larangan dalam UU Pilkada maupun regulasi di PKPU maupun di Perbawaslu apabila paslon membiayai kebutuhan tim sukses seperti biaya operasional, mencetak alat peraga kampanye termasuk biaya transportasi bila ada kampanye.” (Wawancara dengan mantan komisioner Panwaslih Pilkada pada 10 Januari 2025).

Nova Nazwa Ramadhanti, dkk menjelaskan, ”politik uang, atau yang sering disebut juga sebagai money politics, merujuk pada upaya untuk mempengaruhi perilaku masyarakat atau pemilih melalui pemberian imbalan materi, baik itu dalam bentuk uang atau barang, yang dimiliki oleh individu atau partai politik. Tujuan dari politik uang adalah untuk memperoleh dukungan atau suara dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Dalam praktiknya, politik uang seringkali terkait dengan praktik suap atau sogokan, di mana pemilih diberi imbalan materi untuk memilih calon tertentu.” (Nova Nazwa Ramadhanti, dkk, “Money Politics VS Cost Politics: Memilih Makna yang Terlihat Sama”, Jurnal Aliansi - Volume 1, No. 2, Maret 2024, hal. 24).

Selanjutnya Nova Nazwa Ramadhanti, dkk, menjelaskan, ”Di sisi lain, politik biaya, atau *cost politics*, mengacu pada semua biaya yang terlibat dalam proses politik, khususnya dalam konteks pemilihan umum. Ini mencakup biaya kampanye, iklan politik, dan segala kegiatan

lain yang memerlukan pengeluaran dana. Politik biaya juga mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan upaya memperoleh dukungan dari pemilih, seperti pemasangan spanduk, iklan di media massa, dan kegiatan sosialisasi lainnya.” (Nova Nazwa Ramadhanti, dkk, “Money Politics VS Cost Politics: Memilih Makna yang Terlihat Sama”, Jurnal Aliansi - Volume 1, No. 2, Maret 2024, hal. 25).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa money politik atau korupsi elektoral dan cost politik berbeda. Money politik dilakukan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih paslon tertentu atau tidak memilih paslon tertentu. Praktek money politik bukan hanya terjadi Indonesia yang mayoritas penduduknya masih banyak yang belum terpelajar, tetapi di Amerika Serikat sebagai negara kampiun demokrasi, praktek politik uang juga tidak bisa dihindari.

”Mengenai politik uang ini, sesungguhnya tidak hanya terjadi di Indonesia, di Amerika Serikat sekalipun sebagai kampiun demokrasi-politik uang adalah kenyataan yang sulit dihindari. Pada saat Pemilu Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) digelar 2 tahun lalu pada tahun 2016, seorang pengajar hukum di Harvard Law School bernama Adrian Vermeule bahkan menyebut Pilpres AS sebagai “Dolartokrasi” (Vermeule, 2018:2). Inti tulisannya adalah demokrasi di AS dianggap sedang sakit akut, sebab telah diinveksi oleh berbagai skandal politik uang sebagai korupsi elektoral. Imbasnya kemenangan Presiden Trump ditanggapi dingin dan pesimis oleh berbagai kalangan. Intinya bisa dikatakan bahwa politik uang adalah penyakit demokrasi di negara manapun, termasuk di AS sekalipun.” (Hariman Satria, “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (1), 1-14/e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X, hal. 2).

Pada pilkada di Kota Banda Aceh tahun 2024, praktek politik uang dilakukan secara terang-terangan di depan mata. Tim sukses membagi-bagi uang kepada masyarakat dilakukan di rumah calon kepala daerah, posko pemenangan, dan di rumah anggota parlemen pendukung paslon.

”Saya menerima uang dalam amplop dua ratus ribu diberikan di rumah salah satu anggota DPR RI di kawasan Lampriet Banda Aceh. Ramai sekali yang antrian waktu pembagian uang.” (Wawancara dengan warga Lampriet penerima uang (inisial H) pada 11 Januari 2025).

Hal senada disampaikan oleh penerima uang lainnya di Gampong Beurawe Banda Aceh bahwa ia diberikan uang dalam amplop oleh tim sukses salah satu paslon di poskonya yang disaksikan oleh orang banyak.

”Saya dan kawan-kawan menerima uang dua ratus ribu dalam amplop di belakang toko di Beurawe di poskonya pada hari minggu tenang, satu hari sebelum pencoblosan. Banyak orang lihat, tapi Panwas tidak melarangnya.” (Wawancara dengan warga Beurawe penerima uang (inisial Y) pada 11 Januari 2025).

Praktik money politik juga terjadi secara terang-terangan dilakukan di rumah paslon di kawasan Lampaseh, di mana ribuan orang antrian mengambil ”uang sogok” tersebut yang diberikan oleh tim sukses dan disaksikan langsung oleh paslon dalam jumlah besar.

”Saya mengambil uang warga gampong saya sekitar dua ratus orang di rumah paslon di Lampaseh. Masing-masing kami mendapatkan dua ratus ribu yang telah disiapkan dalam amplop yang di dalamnya ada kartu bergambar paslon.”

Selain dalam bentuk uang cash, di daerah Peuniti Kecamatan Baiturrahman selain dibagikan uang, juga diberikan sajadah dan kain sarung yang dibagikan oleh tim pemenangan salah satu paslon melalui anggota DPRK pendukung paslon tersebut.

”Saya mendapatkan kain sarung, sajadah, dan uang dibagikan oleh tim sukses paslon di Gampong Peuniti. Uang atau bantuan itu dari anggota DPRK pendukung paslon itu.” (Wawancara dengan penerima uang, sajadah, kain sarung (inisial RD) pada 11 Januari 2025).

Praktek yang diduga money politik juga dilakukan di sebuah cafe di kawasan Gampong Geuce. Uang tersebut dibagikan oleh salah satu pendukung paslon secara cash. Setiap orang yang sudah tercantum namanya dalam daftar penerima mendapatkan Rp. 200.000 (dua ratus ribu).

”Saya menerima uang dua ratus ribu dibagikan oleh ibu-ibu di cafe depan rumah sakit Fakinah Banda Aceh dua ratus ribu dibayar cash. Kami sekitar 30 orang semuanya mendapatkan uang itu yang telah memberikan KTP sebelumnya.”

Praktek money politik juga dilakukan melalui transfer langsung ke rekening penerima yang dilakukan oleh tim sukses. Uang juga diberikan pada masa tahapan minggu tenang melalui koordinator di setiap kecamatan dalam jumlah relatif besar. Koordinator kecamatan biasanya anggota DPRK dari partai pendukung paslon.

”Uang juga ditransfer melalui rekening penerima, ada juga melalui koordinator kecamatan yang merupakan anggota DPRK aktif yang jumlah besar untuk dibagikan ke pendukung paslon yang telah menyerahkan KTP sebelumnya. Setiap orang rata-rata mendapatkan dua ratus ribu dan ada juga seratus ribu.” (Wawancara dengan penerima uang (inisial AM) pada 12 Januari 2025).

Praktek money politik juga melibatkan tokoh masyarakat di dalam sebuah gampong. Uang yang diterima dari paslon dibagikan kepada masyarakat dalam wilayah gampong yang telah didata sebelumnya oleh tim pendukungnya.

”Tokoh masyarakat seperti kepala dusun atau sekdes dan ketua pemuda juga ikut bermain di Banda Aceh melakukan money politik. Uang dalam jumlah besar dibagikan oleh tokoh masyarakat kepada penerima yang memberikan KTP-nya sebelumnya.” (Wawancara dengan tokoh masyarakat (inisial MA) pada 12 Januari 2025).

Pemilih yang telah menerima uang dari paslon atau tim sukses paslon tidak semuanya memilih calon yang telah memberikan uang kepadanya. Mereka beralasan bahwa uang yang menerima terima merupakan bentuk sogokan kepadanya, sementara ia sendiri tidak menyukai calon tersebut.

”Saya kasih KTP ke semua paslon dan ambil semua uangnya, tapu saya tidak coblos orang tersebut. Dari tiga paslon yang memberikan uang, saya pilih sesuai nurani, tidak saya coblos semuanya.” (Wawancara dengan masyarakat (inisial DR) pada 12 Januari 2025).

Hal serupa dilakukan oleh pemilih lain bahwa ia mengambil uang dari paslon tertentu, tetapi ia tidak memilih paslon yang memberikan uang kepadanya.

”Saya dapatkan uang satu juta untuk lima orang di keluarga saya, tapi kami tidak satupun coblos yang berikan uang. Kami coblos paslon lain yang kami suka.” (Wawancara dengan masyarakat (inisial Bus) pada 12 Januari 2025).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa praktek money politik benar-benar terjadi di pilkada Banda Aceh tahun 2024. Uang diberikan oleh tim sukses baik secara cash maupun dimasukkan dalam amplop. Money politik juga dilakukan melalui pemberian alat perlengkapan salat seperti sajadah, dan lain-lain.

Praktik money politik memiliki dampak negatif yang serius terhadap integritas demokrasi dan kehidupan masyarakat. Ketika suara pemilih dibeli dengan uang tunai, amplop, atau barang seperti perlengkapan salat, proses demokrasi menjadi kehilangan makna sejatinya. Pemilih tidak lagi memilih berdasarkan kualitas calon, tetapi lebih karena iming-iming materi. Hal ini merusak prinsip keadilan dalam pemilu, memperkuat budaya transaksional, dan mengurangi kesadaran politik rakyat (Putri et al., 2024). Selain itu, money politik meningkatkan biaya politik bagi kandidat, yang sering kali mendorong mereka untuk melakukan korupsi setelah terpilih guna mengembalikan modal kampanye. Akibatnya, pemimpin yang terpilih cenderung tidak fokus pada pelayanan publik dan pembangunan, tetapi lebih pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Widiyanti, 2024).

Dampak lain dari money politik adalah terciptanya diskriminasi dan ketidakadilan dalam persaingan politik, karena kandidat yang memiliki kekuatan finansial besar memiliki peluang lebih besar untuk menang dibandingkan kandidat yang kompeten tetapi minim dana. Praktik ini juga dapat memicu konflik sosial antarpendingungan serta memperburuk kohesi sosial di masyarakat (Putri et al., 2024). Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku money politik, edukasi politik kepada masyarakat, serta transparansi dalam dana kampanye. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemilu dapat berlangsung lebih bersih, adil, dan mencerminkan aspirasi rakyat secara utuh.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Pilkada di Kota Banda Aceh pada pilkada tahun 2024 diwarnai praktek politik uang yang dilakukan oleh tiga paslon. Uang yang diberikan pada masa tenang sebagiannya ditransfer langsung ke rekening penerima dan sebagiannya dibagikan oleh tim suksesnya. Uang yang dibagikan rata-rata setiap orang Rp. 200.000 (dua ratus ribu) dimasukkan dalam amplop yang disertai kartu nama paslon. Bentuk operasional money politik juga dilakukan dengan memberikan alat perlengkapan salat, seperti sajadah, kain sarung dan sebagainya. Money politik terjadi secara terang-terangan dilakukan di rumah paslon atau tim pendukungnya dan di posko-posko tim pemenangan, dan sebagiannya diantar langsung ke rumah penerima oleh tim sukses. Sebagian anggota DPRK aktif dan anggota DPR RI aktif juga ikut memberikan uang pada masa tenang kepada pemilih di rumah-rumah mereka. Meskipun paslon menggelontarkan uang dalam jumlah besar, tidak ada pengaruh signifikan mendulang suara. Masyarakat mengambil uang yang diberikan oleh paslon melalui tim suksesnya, tetapi tidak semuanya mencoblos paslon yang melakukan praktek money politik. Saran dari penelitian ini adalah agar Pengawas Pilkada (Panwaslih) direkrut bukan dari dukungan partai politik atau rekomendasi dari dari parpol. Paslon yang terlibat dalam money politik dapat didiskualifikasi kendati tidak dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

-.

6. DAFTAR RUJUKAN

- Aminuddin dan Intan Kumalasari, "Politik Uang Larangan dalam Islam dan Pencegahan pada Pesta Pemilu 2024", Jurnal Universitas Dharmawangsa, Volume 18, Nomor 3: 643-656 Juli 2024| ISSN (P): 1829-7463 | ISSN (E) : 2716-3083.
- Arum Sutrisna Putri, Daftar Kabupaten dan Kota di Indonesia, diakses melalui: <https://www.kompas.com> pada 4 Januari 2025.
- Fitri Juliana, "Ada Politik Uang di Pilkada Kota Banda Aceh", diakses melalui: <https://digdata.id> pada 2 Januari 2025.
- Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia", Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (1), 1-14/e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X.
- Putri, A. I. E., Sukmana, O., & Susilo, R. K. D. (2024). Pandangan Revolusioner Generasi Z Terhadap Praktik Money Politik: Tinjauan Literatur. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*.
- Teuku Muhammad Valdy Arief, "5 Orang Terjadi OTT Politik Uang di Banda Aceh", diakses melalui: <https://regional.kompas.com> pada 3 Januari 2025.
- Nova Nazwa Ramadhanti, dkk, "Money Politics VS Cost Politics: Memilih Makna yang Terlihat Sama", Jurnal Aliansi - Volume 1, No. 2, Maret 2024.
- Widiyanti, R. A. (2024). Kajian Upaya Pemberantasan Pengaruh Money Politik dalam Mobilisasi Pemilu. *In Proceeding Legal Symposium (Vol. 2, No. 2)*.